

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA TOMOHON**

**OLEH :**

**SHELLY ANANDA CAROLIN TIWOW**

**NIM : 20043087**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINAL TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Akuntansi.....	5
1. Pengertian akuntansi.....	5
2. Akuntansi Pemerintah.....	5
B. Sistem Pengendalian Internal.....	6
1) Pengertian Pengendalian Internal.....	6
2) Tujuan Pengendalian Internal.....	7
3) Unsur Pengendalian internal.....	9

C. Kas.....	11
1. Pengertian Kas.....	11
2. Pengeluaran kas.....	12
D. Penelitian Terdahulu.....	14
E. Kerangka Berpikir.....	18
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
B. Jenis Penelitian.....	19
C. Teknik Pengambilan Data.....	19
D. Jenis dan Sumber Data.....	20
E. Teknik Analisis Data.....	20
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
A. Gambaran Umum.....	21
1. Sejarah Singkat BPKPD Kota Tomohon.....	21
2. Struktur Organisasi BPKPD Kota Tomohon.....	22
3. Uraian Tugas dan Fungsi.....	23
4. Visi dan Misi BPKPD Kota Tomohon.....	37
B. Hasil Penelitian.....	37
C. Pembahasan.....	41
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang memuat tentang keuangan daerah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan peraturan yang memuat tentang pemerintah daerah tertulis dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tercapainya transparansi dan akuntabilitas dari keuangan daerah adalah dengan menyatakan serta membuktikan melalui laporan pertanggungjawaban seperti laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan yang telah disebutkan maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik dan benar.

Sistem pengendalian internal tertulis dalam (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, 2008). Dalam peraturan ini menyatakan sistem pengendalian internal harus diselenggarakan menyeluruh baik dilingkungan pemerintahan pusat bahkan pemerintahan daerah. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, merupakan lima bagian yang memiliki hubungan erat serta termasuk dalam unsur sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran kas dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan dan penyimpangan dalam memproses pengeluaran kas.

Pentingnya sistem pengendalian internal tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah sesuatu yang penting dalam mengelola keuangan daerah karena melibatkan pengeluaran dana untuk berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah. Maka, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dalam menjamin bahwa pengeluaran kas dilakukan secara tepat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan untuk mencegah penyalahgunaan, kecurangan, atau kesalahan. Menurut Ismail (2011), prosedur pengeluaran kas merupakan satu hal yang harus diperhatikan agar dapat mengkoordinasi semua aktivitas agar berjalan sesuai dengan rencana. Semua badan pengelola keuangan daerah pasti memerlukan sistem pengendalian internal yang memadai agar semua yang telah direncanakan bisa tercapai sesuai dengan harapan. Untuk mencegah kegagalan dalam pengelolaan pengeluaran kas, sistem pengendalian internal ini sangat berpengaruh karena dapat mengurangi kecurangan dari tahapan merencanakan sampai pada tahapan mempertanggungjawabkan. Sistem ini harus dilaksanakan secara teratur dan terarah pada tujuan utamanya. Sistem Pengendalian internal bisa dijadikan pedoman serta tolak ukur, maka dari itu sistem ini merupakan salah satu hal yang wajib untuk diberi perhatian oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Tomohon terlebih khusus satuan kerja perangkat daerah yang harus melaksanakan efektivitas sistem pengendalian internal adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Di BPKPD Kota Tomohon proses dari pengeluaran kas belum berjalan sesuai dengan unsur dari pengendalian internal. Ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan proses pengeluaran kas belum efektif, yaitu keterlambatan pemasukan berkas-berkas yang membuat bendahara pengeluaran tidak bisa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan kesalahan dalam memasukan data karena kurang pemahaman terhadap aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penempatan pegawai yang tepat juga memiliki peran penting bagi sebuah instansi, karena jika tidak tepat akan terjadi kesalahan

dalam pencatatan akuntansi yang membuat pengeluaran kas tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Keunikan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (Masanae et al., 2022) masalah yang dibahas didalamnya lebih berfokus pada permasalahan yang akan muncul yang mengakibatkan kinerja capaian kinerja tidak maksimal maka harus direvisi kembali kegiatan pengendalian agar dapat menangani permasalahan tersebut sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pengendalian internal yang berjalan di BPKPD Tomohon sudah efektif atau belum sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menentukan rumusan masalah yaitu, bagaimana sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Tomohon?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Badan pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah berjalan dengan efektif atau belum efektif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat, antara lain :

1. Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, sebagai masukan serta menjadi rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon terkait kekeliruan dan kelalaian yang harus diperbaiki ataupun peningkatan yang dapat dilakukan pada sistem pengendalian internal pengeluaran kas. Rekomendasi ini dapat membantu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah Kota

Tomohon untuk menerapkan kerja yang lebih baik dalam mengelola pengeluaran kas.

2. Bagi peneliti, dapat membuka wawasan bagi peneliti mengenai konsep dan komponen-komponen pengeluaran kas yang harus berjalan sesuai dengan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

